

Analisis Kapasitas Fiskal dan Peranannya Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur) (Analysis fiscal capacity and roles against PDRB (a case study district / cities in east java)

Adelia Herdaleny, Badjuri, Fajar Wahyu Prianto
Jurusan IESP, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Herdaleny_adelia@yahoo.co.id

Abstrak

Dengan berubahnya sistem pemerintahan yang ada, dimana pemerintah daerah dapat mengatur dan mengalokasikan secara mandiri penerimaan daerah. Kebijakan fiskal difungsikan untuk meningkatkan pendapatan regional dan mengembangkan potensi yang ada, sehingga memacu peningkatan output maupun aktivitas perekonomian. Selama 4 tahun pelaksanaan kebijakan fiskal di Provinsi Jawa Timur yaitu periode tahun 2010-2013 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur meningkat tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar tingkat kapasitas fiskal kabupaten/kota di Jawa Timur dan bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap pendapatan regional di Jawa Timur Tahun 2010-2013. Jenis data penelitian ini adalah data panel (*Panel Least Square*) dengan menggunakan data sekunder berdasarkan urutan waktu (*time series*) dan berdasarkan urutan observasi (*cross section*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS (*Ordinary Least Square*) dengan pendekatan *fixed effect*. Dari hasil penelitian diketahui tingkat kapasitas fiskal kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur relatif tinggi, di mana tingkat kemampuan pengelolaan keuangan daerah sudah cukup baik. Begitu juga dengan adanya pengaruh yang positif antara pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pendapatan regional.

Kata kunci: . Kapasitas Fiskal, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Regional.

Abstract

With the change of administration system, Where local government can arrange and allocating independently regional income. Fiscal policy functioned to increase revenue regional and develop the existing potential , so that spur increasing output and economic activities. 4 years for the fiscal policy in east java namely the period 2010-2013 note that economic growth of 35 / city district in east java increased every year. This research aims to know how big the level of fiscal capacity of districts in east java and how the influence of fiscal policy against revenue regional in east java 2010-2013 year. The kind of data research is the panel (panel least square) using data secondary based on a time (time series) and based on a observation (cross section) .Methods used in research is (ols ordinary least square) by approach fixed effect. The research known the capacity level of fiscal / district city in east java relatively high , where rate ability regional financial management is enough .So are the positive influence between government spending and investment against PDRB

Keywords: *fiscal capacity , fiscal policy , regional income*

Pendahuluan

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan mengolah sumber daya yang ada sehingga pembangunan lebih sesuai dengan potensi dan prioritas daerahnya demi terciptanya tujuan otonomi daerah oleh pemerintah (Wibowo, 2004). Desentralisasi fiskal adalah salah satu bentuk wewenang yang dimiliki pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999. Praktek desentralisasi fiskal dijalankan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “*money follows functions*”, yaitu fungsi pokok

pelayanan publik yang di daerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Kuncoro, 2007). Pada dasarnya semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan bahwa semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, sebaliknya semakin kecil kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan bahwa semakin besar ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Salah satu desentralisasi yang paling banyak disoroti dan berpengaruh terhadap perkembangan daerah adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah (Fajrin, 2009). Kebijakan Fiskal adalah instrumen penting peranannya dalam sistem

perekonomian yang berguna untuk mendorong pendapatan regional.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa

Propinsi	2007	2008	2009
DKI Jakarta	6,44	6,23	5,02
Banten	6,04	5,77	4,71
Jawa Tengah	5,59	5,61	5,14
Jawa Barat	6,48	6,21	4,19
Jawa Timur	6,11	5,94	5,01
DI. Yogyakarta	4,31	5,03	4,43

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010.

Laju pendapatan regional di Jawa Timur berdasarkan Tabel 1.1 selama periode 2006-2010 memiliki tingkat yang cukup signifikan. Walaupun dalam rata-rata pendapatan regional Propinsi DKI Jakarta masih tertinggi. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola Sumber Daya Alam yang dimilikinya. Kinerja ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB dalam nilai riil karena menunjukkan pertumbuhan output sebenarnya (Joko Tri, 2006: 12).

Kebijaksanaan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah dilakukan dengan transfer dana dari pemerintah Pusat kepada Daerah melalui konsep Fiscal Gap yaitu kebutuhan Daerah (kebutuhan fiskal) dibandingkan dengan potensi Daerah (kapasitas fiskal). Kebutuhan daerah yang melebihi kapasitas fiskal akan ditutup dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Umum yang disalurkan kepada Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* dan *cross section*, data variabel yang digunakan merupakan data tahunan pada rentang periode tahun 2010-2013 dengan objek penelitian 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. sehingga merupakan pooled the data yaitu gabungan antara data time series (tahun 2010-2013: 5 tahun) dengan data cross section 38 kabupaten/kota. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan instansi terkait lainnya.

Metode Analisis Data

1. Indeks Kapasitas Fiskal

Bertujuan untuk mengetahui tingkat kapasitas Fiskal yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dalam penelitian ini digunakan persamaan umum yang digunakan pemerintah dan menurut peraturan menteri keuangan No 33/PMK.07/2014 adalah sebagai berikut :

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \frac{\text{PAD} + \text{DBH} + \text{DAU} + \text{LP}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}} - \text{BP}$$

Keterangan PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum

LP : Lain-lain Pendapatan yang Sah

BP : Belanja Pegawai

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari 2 atau sama dengan 2 ($\text{indeks} \geq 2$) merupakan Daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal sangat tinggi;
- Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara 1 atau sama dengan 1 sampai dengan 2 ($1 \leq \text{indeks} < 2$) merupakan Daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal tinggi;
- Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara 0,5 atau sama dengan 0,5 sampai dengan 1 ($0,5 \leq \text{indeks} < 1$) merupakan Daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal sedang;
- Daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari 0,5 ($\text{indeks} < 0,5$) merupakan Daerah yang termasuk kategori kapasitas fiskal rendah.

2. Kebijakan Fiskal

Untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal terhadap pendapatan regional pada Kabupaten/Kota, dibutuhkan koefisien (*slope*) pada masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga model ekonometrika yang digunakan adalah metode regresi panel *fixed effect model* dengan asumsi *intersep* dan *slope* berbeda antar individu (*all coefficients vary across individuals*). Model ekonominya adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003: 640-647).

$$Y = f(G, I) \dots \dots \dots (3.1)$$

Dari model 3.1 kemudian ditransformasikan ke model regresi data panel dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_0 G + \beta_1 I + u_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana:

Y : Pendapatan Regional (PDRB),

G : Government Expenditure (Pengeluaran Pemerintah)

I : Investasi

α_1 : Intercept,

β_1, β_2 : Slope coefficient,

u_{it} : Error term.

Uji Statistik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pada masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas baik secara parsial maupun secara bersama terhadap variabel terikat, antara lain:

- Uji Koefisien Determinasi (R^2) Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan

demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

2. Uji F-statistik

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel, (H_0 di tolak H_a diterima) maka variabel independennya secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya, sebaliknya jika F hitung < F tabel, maka variabel independennya secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

3. Uji t-statistik

Menurut Imam Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji ini adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel mempunyai distribusi data yang normal maupun mendekati normal atau tidak. Pengujian didasari dari data dengan mean dan standart deviasi yang sama. Uji normalitas digunakan jika sampel kurang dari 30, karena jika sampel lebih dari 30 maka error term akan terdistribusi dengan normal (Gujarati, 2009). Untuk menguji normalitas data dalam penelitian menggunakan *Jarque Bera Test*. Uji *Jarque Bera* didistribusi dengan X^2 dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar 2, dimana X^2 –hitung < X^2 –tabel menunjukkan data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini berguna untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasi) yang sempurna atau hamper sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas. Multikolinieritas dalam model dapat dilihat dari nilai t dan F dalam model. Apabila nilai F berpengaruh signifikan tetapi nilai t tidak signifikan maka dapat diduga terjadi multikolinieritas. Perbaikan dalam pelanggaran ini dapat diatasi dengan pemberian perlakuan *crosssection weight*.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. (Ghozali, 2006:99-100) Untuk menguji ada gejala autokorelasi dalam model regresi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (DW).

Tabel Nilai Durbin Watson dalam Eviews

Nilai DW	Hasil
$DW < dl$	Tolak H_0 Korelasi serial positif
$dl < DW < du$	Hasil tidak dapat ditemukan
$du < DW < 4-dl$	Terima H_0 tidak ada korelasi positif atau negatif
$4-du < DW < 4-dl$	Hasil tidak dapat ditemukan
$DW < 4-dl$	Tolak H_0 korelasi negatif

Sumber : Nachrowi, 2006

4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2006:125).

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji statistik yaitu uji *glejser* sehingga lebih menjamin keakuratan hasil. Uji *glejser* dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.

a. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen yaitu probabilitas signifikansinya < 0,05, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen yaitu probabilitas signifikansinya > 0,05, maka tidak ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tingkat Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Tabel Tingkat Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	
Pacitan	0,347712	0,54515	1,803485	1,355137	1,012871
Ponorogo	0,431756	0,542498	1,397155	1,697531	1,017235
Trenggalek	0,310524	1,013911	1,29203	1,539328	1,038948
Tulungagung	0,857047	0,934666	1,64573	0,674675	1,02803
Blitar	0,663127	1,023453	1,174265	1,45433	1,078794
Kediri	0,413298	0,971437	1,159058	1,721505	1,066325
Malang	0,839606	0,779392	0,42424	1,823188	0,966607
Lumajang	0,963348	1,024797	1,781487	1,076116	1,211437
Jember	0,743361	1,172347	1,568205	1,097032	1,145236
Banyuwangi	1,217651	1,176346	1,020557	1,442322	1,214219
Bondowoso	0,670068	0,809519	1,517163	1,854451	1,2128
Situbondo	0,927005	1,225888	1,952018	1,412406	1,379329
Probolinggo	0,494266	1,422523	0,232491	1,242167	0,847862
Pasuruan	0,531109	1,968251	1,469283	1,739601	1,427061
Sidoarjo	1,744191	1,464554	1,168241	1,237377	1,403591
Mojokerto	1,606205	0,569083	1,326128	1,887052	1,347117
Jombang	1,063496	3,585171	1,375215	1,249767	1,82
Nganjuk	1,378806	1,619131	2,214594	2,945334	2,039466
Madiun	0,89845	1,795367	0,91763	0,58334	1,048697
Magetan	0,38581	0,875428	1,47244	1,57473	1,077102
Ngawi	0,294045	0,745686	1,349338	1,852003	1,060268
Bojonegoro	1,482432	1,244715	1,585075	1,593999	1,476555
Tuban	0,423542	0,432387	0,742349	1,376203	0,74362
Lamongan	1,224322	1,610311	1,172533	1,90386	1,477757
Gresik	1,555986	1,241844	1,297646	1,925903	1,505345
Bangkalan	0,01463	0,070061	0,388781	0,55956	0,258258
Sampang	0,03081	0,31789	0,272097	0,42174	0,260634
Pamekasan	1,332661	1,657667	1,483611	1,356918	1,457714
Sumenep	0,310653	0,403259	0,517529	0,884239	0,52892
Kota Kediri	0,441577	1,16716	1,87611	0,53254	1,004347
Kota Malang	1,49377	1,9991	1,8587	1,3205	1,668018
Kota Probolinggo	1,435176	1,656907	1,19109	1,75145	1,508656
Kota Pasuruan	1,13076	1,5633	1,853262	1,77026	1,579396
Kota Mojokerto	0,764	1,7606	1,2472	1,7446	1,3791
Kota Madiun	1,12815	2,6772	1,572	1,6375	1,753713
Kota Surabaya	1,400887	1,918969	1,561293	1,88328	1,691107
Kota Batu	1,84032	1,60534	1,61282	1,024	1,52062

Dilihat dari tabel di atas dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi adalah Kabupaten Nganjuk dengan rata-rata tingkat kapasitas fiskal di atas 2. Kabupaten/Kota yang dinilai memiliki tingkat kapasitas fiskal tinggi yaitu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten, Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pamekasan, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya

dan Kota Batu dengan rata-rata tingkat kapasitas fiskal antara 1 hingga 2.

Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kapasitas fiskal sedang yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Sumenep dengan rata-rata tingkat kapasitas fiskal antara 0,5 hingga 1.

Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kapasitas fiskal rendah yaitu Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dengan rata-rata tingkat kapasitas fiskal dibawah 0,5.

Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Kuncoro(2004) dimana sumberdaya alam, jumlah penduduk dan modal yang ada mempengaruhi tingkat pendapatan regional. Dengan demikian tingkat kapasitas fiskal yang ada di kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur masih cukup relatif tinggi, hanya beberapa kabupaten/kota saja yang belum dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerahnya sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada.

2. Kebijakan Fiskal Di Jawa Timur

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/01/15 Time: 20:01
 Sample: 2010 2013
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.116457	0.149812	7.452392	0.0000
X1	0.489192	0.032979	14.83326	0.0000
X2	0.106470	0.030275	3.516799	0.0006

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.975415	Mean dependent var	6.601671
Adjusted R-squared	0.966854	S.D. dependent var	0.059071
S.E. of regression	0.010755	Akaike info criterion	-6.006041
Sum squared resid	0.012954	Schwarz criterion	-5.210283
Log likelihood	496.4591	Hannan-Quinn criter.	-5.682777
F-statistic	113.9374	Durbin-Watson stat	1.775935
Prob(F-statistic)	0.000000		

Kesimpulan pertama dari analisis data di atas adalah kenaikan pengeluaran pemerintah dan investasi berdampak positif terhadap peningkatan PDRB, Dalam penelitian ini, Konsumsi yang berkurang akan mengurangi komponen pembentuk pendapatan regional dan hasilnya nilai pendapatan pun akan berkurang sesuai nilai multiplernya.

Hasil Analisis

Uji Statistik

a Uji F_{statistik}

Uji F_{statistik} berguna untuk menguji signifikansi seberapa besar pengaruh variabel independen (Pengeluaran Pemerintah, Pajak dan Investasi) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Pendapatan Regional). Dalam hasil regresi data panel random effect (lampiran) menunjukkan nilai probabilitas sebesar $F_{statistik} = 0.000000 < \text{nilai probabilitas } (\alpha = 0,05, \text{ itu artinya } H_0 \text{ diterima yang artinya semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen atau Pengeluaran Pemerintah, Pajak dan Investasi secara simultan variabel berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pendapatan regional.}$

b. Uji t_{statistik}

Pengujian model dengan uji ini untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil analisis diperoleh t-hitung sebagai berikut :

Tabel Hasil Uji t-statistik Variabel Pengeluaran Pemerintah, Pajak dan Investasi

Variabel	Nilai Probabilitas	$\alpha = 5\%$	Keterangan
Pengeluaran Pemerintah (X1)	0.0000	0,05	Signifikan
Investasi (X2)	0.0006	0,05	Signifikan

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa setiap variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

c.Uji R² (Uji Koefisien Determinan)

Koefisien R² dalam model penelitian ini sebesar atau . hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pengeluaran pemerintah, pajak dan investasi mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pendapatan regional yang merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi regional sebesar. Sedangkan sisanya yaitu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam model estimasi.

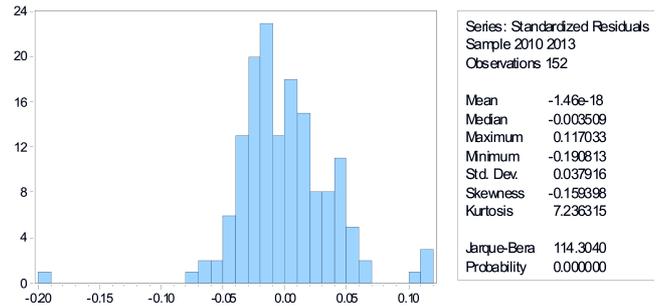
Hasil perhitungan menunjukkan nilai R² = 0.975415, artinya IPM di Jawa Timur mampu dijelaskan variabel-variabel independen investasi publik dan swasta sebesar 97,54% sedangkan sisanya 2,46% dijelaskan variabel lain di luar model.

5 Hasil Uji Asumsi Klasik.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Jarque Bera test. Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai skewness dan kurtosis untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Nilai J-B hitung < nilai (tabel chi square), maka hipotesis yang

menyatakan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya (Nachrowi, 2006).



Berdasarkan nilai probabilitas X² sebesar $0,000000 \leq \text{nilai probabilitas } (\alpha = 0.05), \text{ dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak terdistribusi normal karena nilai probabilitas } X^2 \text{ hitung lebih kecil dibanding nilai probabilitas } \alpha = 0,05.$

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan auxiliary regresi untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R² regresi persamaan utama lebih besar dari R² auxiliary regresi maka dalam model tidak terdapat multikolinearitas (Nachrowi, 2006).

Tabel Hasil uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2
Y	1.000000	0.796255	0.796255
X1	0.796255	1.000000	0.801831
X2	0.862869	0.801831	1.000000

Hasil matrik korelasi terlihat bahwa hubungan antara semua variabel independen berada di bawah 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model.

c.Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana error term tidak memiliki suatu varian yang konstan untuk semua observasi. Masalah heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data cross section daripada time series serta muncul baik pada regresi sederhana maupun regresi berganda. Apabila didapatkan R-squared yang tinggi sementara terdapat sebagian variabel secara parsial tidak signifikan, maka diduga terjadi multikolinearitas pada model tersebut. Karena model penelitian ini menggunakan data panel maka masalah multikolinearitas secara teknis dapat dikurangi. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser.

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/01/15 Time: 20:08
 Sample: 2010 2013
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.694866	0.034049	-20.40754	0.0000
X1	0.105481	0.007496	14.07235	0.0000
X2	-0.053065	0.006881	-7.711921	0.0000
R-squared	0.813724	Mean dependent var		0.007334
Adjusted R-squared	0.811223	S.D. dependent var		0.005626
S.E. of regression	0.002444	Akaike info criterion		-9.170567
Sum squared resid	0.000890	Schwarz criterion		-9.110886
Log likelihood	699.9631	Hannan-Quinn criter.		-9.146323
F-statistic	325.4432	Durbin-Watson stat		3.551261
Prob(F-statistic)	0.000000			

d. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika itu terjadi maka terdapat problem autokorelasi. Model yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006: 99-100).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat melalui tabel uji statistik Durbin-Watson. Hasil regresi data panel metode *fixed effect* nilai Durbin-Watson (lihat tabel 4.4) sebesar 0.23. Asumsi tidak terjadi autokorelasi yaitu apabila lebih jelasnya lihat perhitungan dibawah ini:

Diketahui :

$$D_w = \frac{1,7481}{1,775935} < \frac{1,775935}{1,775935} < \frac{4-1,775935}{1,775935}$$

Karena nilai Durbin-Watson lebih dari durbin upper (d_u) dan kurang dari $4-d_u$ maka model tidak terjadi autokorelasi.

Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kapasitas fiskal tiap kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur berbeda dilihat dari rata-rata 4 tahun terakhir dapat dikelompokkan menjadi 4 kriteria. Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kapasitas fiskal sangat tinggi adalah kabupaten Nganjuk. Dengan kata lain Kabupaten Nganjuk berhasil dalam mengelola keuangan daerah dan disalurkan pada program kerja yang tepat.

Kabupaten/Kota yang dinilai memiliki tingkat kapasitas fiskal tinggi yaitu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri,

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten, Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pamekasan, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu dengan rata-rata tingkat kapasitas fiskal antara 1 hingga 2. Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat kapasitas fiskal sedang yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Sumenep dengan rata-rata tingkat kapasitas fiskal antara 0,5 hingga 1.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sangat strategis, dimana tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi menjadi dasar-dasar penilaian program pembangunan yang ada (Todaro, 2000:136). Pertumbuhan yang tidak terlepas dari peranan investasi sektor publik maupun swasta, menyebabkan kenaikan konsumsi pemerintah (G) dan naiknya pajak yang dihasilkan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Kesimpulan pertama dari analisis data di atas adalah kenaikan pengeluaran pemerintah dan investasi berdampak positif terhadap peningkatan PDRB, Dalam penelitian ini, Konsumsi yang berkurang akan mengurangi komponen pembentuk pendapatan regional dan hasilnya nilai pendapatan pun akan berkurang sesuai nilai multipliernya. Menurut pendekatan Keynes, kebijakan fiskal diyakinidapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan marginal propensity to consume (mpc), menjadi rantai perekonomian untuk peningkatan pengeluaran yang lebih banyak dan pada akhirnya terhadap output (Jhinghan, 2009)

Investasi dalam penelitian ini berdampak positif terhadap pendapatan regional. Itu artinya iklim investasi yang ada di Jawa Timur dapat memacu konsumsi yang ada di kabupaten/kota di Jawa Timur. Sesuai dengan teori endogen yang berpendapat bahwa semakin tingginya investasi yang dilakukan akan menciptakan ekonomi eksternal dan meningkatnya produktivitas dan Keynes memformulasikan hubungan antara investasi dengan output nasional. Model akselerator investasi menegaskan bahwa laju investasi akan sebanding dengan perubahan output perekonomian (Thodaro, 2000).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan mengubah ubah penerimaan pajak dan pengeluaran negara (Prathama Rahardja, 2001). Dengan Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong

dan menghambat bentuk investasi tertentu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor publik, namun pada kenyataannya di beberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersebut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi.

Kesimpulan

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dengan membahas tentang UMP dan inflasi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Besarnya kapasitas fiskal suatu daerah bergantung kepada porsi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, semakin besar pula jumlah uang dari porsi anggaran yang akan diberikan untuk pembangunan. Pembangunan meningkat, kegiatan ekonomi masyarakat akan lebih efisien yang berarti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tingkat kapasitas fiskalnya terdapat empat klasifikasi yang ada, yaitu (a) kapasitas fiskal sangat tinggi, (b) kapasitas fiskal tinggi, (c) kapasitas fiskal sedang, dan (d) kapasitas fiskal rendah.

2. Hasil regresi data panel menggunakan *fixed effect model*, menunjukkan variabel kebijakan fiskal (peneluaran pemerintah (G) dan investasi (I), berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan regional di kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang yang sudah dilaksanakan dengan cukup baik dalam penyediaan kepentingan publik demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang kemudian akan menghadirkan peningkatan pendapatan regional di Jawa Timur.

Daftar Bacaan

- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar.N. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.
- Haryanto, Joko Tri. 2006. *Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis*. Jakarta.
- Jhinghan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo : Jakarta

- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Nachrowi, D. 2006. *Ekonometrika: Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : LPFE Universitas Indonesia
- Rahardja, Pratama. 2001. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta : Penerbit Salemba UI
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Thodaro, Michael. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Dunia Ketiga*. Erlangga : Jakarta.
- Wibowo, Tri. 2004. *Potret Fiskal Daerah Sebelum dan Pada Era Desentralisasi Fiskal*. Bunga Rampai Hasil Penelitian. www.bps.go.id